

### **BAB III**

## **TATA KELOLA PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI OBYEK WISATA PUNCAK BECICI**

### **A. Sumber Daya Alam**

#### **1. Sumber Daya Alam Terjaga dengan Baik**

Puncak becici merupakan kawasan Hutan Pinus yang memiliki luas 97,2 hektar akan tetapi, yang dikelola oleh masyarakat untuk dijadikan Obyek Wisata hanya 4,4 hektar. Di Obyek Wisata Puncak Becici terdapat spot foto yang dibuat dengan menggunakan kayu yang dijadikan berbagai macam bentuk oleh pengelola. Akan tetapi, yang digunakan adalah kayu yang berjatuhan dari pohon pinus bukan hasil dari menebang pohon tersebut karena masyarakat atau pengelola dilarang untuk menebang pohon sembarangan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berikut merupakan wawancara peneliti dengan narasumber Bapak Sugandi selaku Ketua Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici :

“Selain memanfaatkan adanya Hutan Pinus, masyarakat juga menjaga kelestarian Hutan dengan cara merawat seperti memberi pupuk disetiap pohon, dalam memberi pupuk disesuaikan dengan musim. Biasanya pengelola memberi pupuk pada saat musim hujan karena apabila diberi pupuk pada musim panas, itu dapat menjadikan racun dan merusak pohon. Pengelola juga melakukan penanaman pohon pinus, tanaman perindang seperti beringin, kayu flamboyan, tanaman bunga, dan tanaman buah sebagai bentuk dari menjaga kelestarian alam.” (Wawancara dengan Bapak Sugandi dilaksanakan pada tanggal 14 November 2018)

Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat melibatkan peran pemerintah karena pemerintah sebagai regulator. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur. Peraturan-peraturan tersebut akan dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam mengelola wisata. Tanpa adanya regulasi yang jelas, seluruh kegiatan pariwisata yang dilakukan masyarakat dianggap sebagai tindakan yang melanggar karena, kegiatan pariwisata tersebut tergolong illegal. Maka untuk menghindari tindakan tersebut dibentuk regulasi oleh pemerintah setempat. Sehingga, dalam melakukan kegiatan pariwisata lebih terarah dan terstruktur yang dapat berpengaruh terhadap pemerintah dan masyarakat. Adapun peran dari pemerintah tersebut sebagai berikut:

a. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Puncak Becici merupakan kawasan hutan Negara yang dikelola oleh Pemerintah melalui Dinas Kehutanan DIY. Dinas kehutan DIY memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola seluruh Kawasan hutan yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Kehutan berperan sebagai regulator sehingga merumuskan suatu kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang menyebutkan bahwa pengelolaan hutan lindung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi ekologi, ekonomi dan sosial. Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY juga memiliki Unit Analisa Pelaksana Teknis Daerah yaitu Kepala Balai yang ditugaskan untuk

mengelola hutan dan memiliki Resort Pengelola Hutan yang ditugaskan untuk mendampingi, mengawasi dan mengarahkan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan.

Berikut merupakan wawancara peneliti dengan narasumber Bapak Sutarto selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY:

“Dalam pengelolaanya pemerintah melibatkan masyarakat melalui kegiatan rehabilitasi, pengamanan hutan, pemanenan getah pinus dan lain-lain. Selain itu juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana cara mengelola hutan yang baik agar dapat dimanfaatkan sebagai wisata akan tetapi dengan tidak merusak dan tetap menjaga kelestariannya. Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY juga membantu mempromosikan wisata tersebut melalui kegiatan seminar, loka karya, dan apabila ada kunjungan dari Dinas luar daerah sehingga membuat mereka ingin tahu dan mencontoh Dinas Kehutanan DIY dengan memanfaatkan hutan yang ada di wilayahnya masing-masing.” (Wawancara dengan Bapak Sutarto dilaksanakan pada tanggal 21 November 2018)

Melihat peran pemerintah seperti yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pemerintah tidak bisa dipisahkan dari Obyek Wisata Puncak Becici. Terlebih pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk mengelola pariwisata tersebut. Karena merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang berlangsung di Obyek Wisata Puncak Becici. Sehingga tanpa ada keterlibatan dari pemerintah tentu hal ini akan sangat membahayakan karena, masyarakat akan sewenang-wenang dalam memanfaatkan potensi yang ada. Bahkan yang paling mengawatirkan adalah bisa saja menyebabkan kerusakan alam yang diakibatkan dari

aktivitas manusia. Oleh sebab itu disinilah kehadiran dari pemerintah yang dibutuhkan agar tidak terjadi penyalahgunaan dan kerusakan kawasan obyek wisata puncak becici.

b. Balai Kesatuan Pengelola Hutan Yogyakarta

Dinas kehutanan dan Perkebunan mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ditugaskan untuk mengelola hutan yang dikenal dengan Kepala Balai. Selanjutnya, perkembangan pengelolaan hutan secara nasional harus dilaksanakan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan. Kesatuan Pengelolaan Hutan di provinsi DIY dimulai tahun 2009 dengan nama Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY. Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY tidak sebagai pelaksana pengelola hutan tetapi sebagai pengendali.

Berikut merupakan wawancara peneliti dengan narasumber Bapak Aji Sukmono selaku Kepala Balai KPH Yogyakarta:

“KPH sebagai mitra pendamping operasional dari masyarakat di dalam pengelolaan wisata. Kegiatan yang dilakukan oleh KPH Yogyakarta bersifat administratif maupun teknis operasional. Bersifat administratif yaitu terkait dengan pelaporan dan keuangan. Sedangkan teknis operasional yaitu apabila masyarakat ingin membangun obyek wisata harus meminta izin kepada KPH apakah diperbolehkan atau tidak kemudian memperhatikan dimana obyek tersebut akan dibuat, dan melakukan pendampingan apabila terdapat event tertentu di kawasan tersebut.” (Wawancara dengan Bapak Aji Sukmono dilaksanakan pada tanggal 21 November 2018)

Pengaruh dengan adanya KPH tersebut yaitu masyarakat menjadi lebih tertib dalam memanfaatkan hutan dengan tidak merusak pepohonan, tidak ada penebangan liar, serta masyarakat dapat memanfaatkan kayu-kayu yang berjatuhan untuk dijadikan bahan untuk membuat spot foto. Tentu dengan adanya KPH masyarakat lebih patuh dan tata kelola lebih tertata dengan baik.

c. Resort Pengelola Hutan Mangunan

Pada dasarnya RPH dan KPH memiliki peran yang sama akan tetapi, kekuasaannya lebih tinggi KPH jadi kebijakan lebih kuat apabila dari KPH, sedangkan RPH tidak bisa memberikan kebijakan hanya dapat mengajukan. KPH pun tidak berani mengambil kebijakan atau memberi izin karena yang berwenang memberi izin adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berikut merupakan wawancara peneliti dengan Bapak Sukir selaku Ketua RPH :

“Peran dari Resort Pengelola Hutan (RPH) Mangunan yaitu mendampingi, mengawasi dan mengarahkan. Jadi dari RPH sendiri tidak dapat turut andil dalam mengatur manajemen pariwisata karena itu sudah diatur oleh Koperasi Noto Wono dan kami hanya mengawasi atau mendampingi apabila dari pengelola ada penyimpangan.” (Wawancara dengan Bapak Sukir dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2018)

Karena Slogan yang dimiliki yaitu “masyarakat sejahtera hutan lestari”, RPH Mangunan mengarahkan agar melestarikan hutan dengan melakukan pemupukan, penanaman kembali, pembuatan terasiring, dibuatkan tempat-tempat aliran air supaya terarah dan tidak merusak. RPH

Mangunan hanya mengawasi wilayahnya saja agar tidak rusak dan mengawasi pembangunan atau infrastruktur jangan sampai lebih dari 10% yang dikelola. Setiap tanggal sepuluh Resort Pengelola Hutan dan pengelola mengadakan pertemuan untuk membahas. Kewajiban dari Resort Pengelola Hutan Mangunan yaitu mengingatkan dan mengarahkan:

“Kita memberi tahu kepada pengelola apabila tanah itu sudah mulai kosong, kayunya sudah mulai rapuh akan tetapi dari pembibitan, penanaman, dan pemeliharannya ya dari Obyek Wisata itu sendiri, jadi kita arahkan untuk mandiri membuat penghijauan”. (Wawancara dengan Bapak Sukir dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2018)

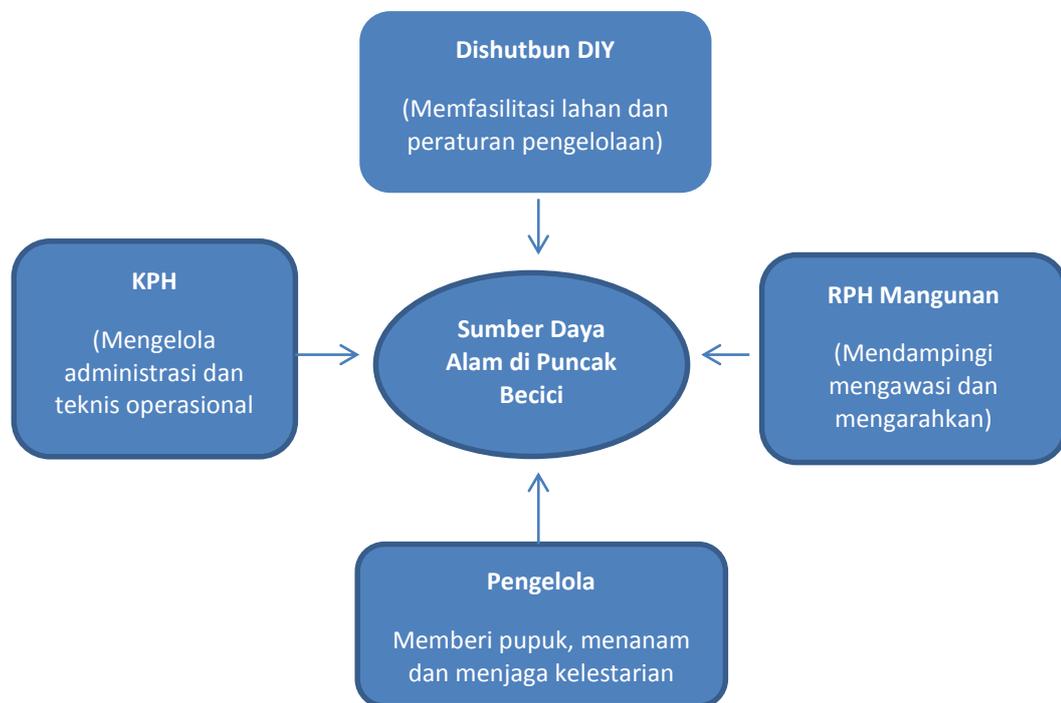
Kayu-kayu yang sudah mati bisa digunakan tetapi tidak boleh keluar dari lokasi tersebut artinya apabila ditebang lalu dibawa kegergaji kembali kesitu itu tidak boleh, jadi kayu bangunan-bangunan itu ya dari luar atau membeli. Akan tetapi apabila kayu yang dijadikan tempat duduk, gapura, pagar, itu memang sisa kayu yang mati dan boleh di manfaatkan.

Dengan adanya RPH Mangunan kegiatan atau aktivitas dikawasan tersebut menjadi lebih terkendali karena diawasi oleh RPH Mangunan. Sehingga apabila terjadi penyimpangan akan segera ditegur dan dibina agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan alam. Kerjasama antara RPH Mangunan dengan Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici sudah baik karena Pengelola mematuhi dan memenuhi apa yang disampaikan oleh RPH Mangunan.

Sumber daya alam yang ada di Obyek Wisata Puncak Becici sudah terjaga dengan baik karena baik pengelola, masyarakat sekitar dan

pemerintah turut berpartisipasi dalam melestarikan hutan. Bukan hanya itu, pengunjung yang ada di Obyek Wisata Puncak Becici juga sudah sadar akan lingkungan sehingga ketika berkunjung tidak merusak hutan. Berikut merupakan gambaran pengelolaan sumber daya alam di Obyek Wisata Puncak Becici:

Gambar 3.1 Pengelolaan Sumber Daya Alam



## **2. Ekonomi Lokal dan Modal Produksi Tergantung Keberlanjutan Pengguna Sumberdaya**

Berikut merupakan wawancara peneliti dengan narasumber yang membahas mengenai ketergantungan ekonomi local terhadap penggunaan sumberdaya :

“Di kawasan Obyek Wisata Puncak Becici, ekonomi local dan modal produksi tidak tergantung dari keberlanjutan sumberdaya karena sebelum adanya Obyek Wisata Puncak Becici, anyaman bambu yang menjadi kerajinan di Desan Muntuk sudah ada sebelumnya. Akan tetapi setelah adanya Puncak Becici membantu meningkatkan taraf perekonomian, kemudian kerajinan tersebut semakin dikenal dan menjadi buah tangan apabila berkunjung ke Desa Muntuk.” (Wawancara dengan Bapak Sugandi dilaksanakan pada tanggal 14 November 2018)

Seperti yang telah disampaikan diatas, ekonomi local dan modal produksi warga sekitar tidak tergantung kepada keberlanjutan sumberdaya. Artinya usaha-usaha yang mereka buat dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti kerajinan-kerajinan bamboo sudah ada sebelum Obyek Wisata Puncak Becici dibuka. Akan tetapi sekarang kerajinan tersebut semakin ramai pembeli yang diakibatkan dari adanya Obyek Wisata Puncak Becici.

## **3. Kebudayaan yang Unik Sebagai Tujuan**

Berikut merupakan wawancara peneliti dengan narasumber yang membahas mengenai kebudayaan yang unik sebagai tujuan wisatawan :

“Di masyarakat terdapat beberapa kegiatan kebudayaan seperti tradisi menganyam yang sudah turun temurun dari jaman nenek moyang karena pada jaman dahulu warga menghidupi keluarga dengan hasil menganyam, hal itu menjadi daya tarik wisatawan

untuk belajar menganyam, selain itu juga ada mertu dusun, dan kenduri wono. Akan tetapi hal itu tidak menjadikan alasan wisatawan untuk berkunjung ke Obyek Wisata Puncak Becici. Wisatawan tertarik untuk mengunjungi Puncak Becici karena panorama alam yang dimiliki.” (Wawancara dengan Bapak Sugandi dilaksanakan pada tanggal 14 November 2018)

Seperti yang telah disampaikan diatas, wisatawan yang berkunjung ke Obyek Wisata Puncak Becici adalah untuk menikmati pemandangan yang disajikan, selain itu suasana yang sejuk dan rindang membuat wisatawan yang berdatangan merasa nyaman karena udaranya yang masih asri.

## **B. Organisasi-organisasi Masyarakat**

Di Obyek Wisata Puncak Becici terdapat organisasi-organisasi masyarakat yaitu Pengelola, Koperasi Noto Wono dan Kelompok masyarakat sebagai penyedia barang dan jasa wisatawan.

### **1. Masyarakat memiliki Norma dan Ideologi**

Berikut merupakan wawancara peneliti dengan Bapak Sugandi selaku Ketua Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici :

“Di Obyek Wisata Puncak Becici terdapat organisasi-organisasi masyarakat yang ikut berperan dalam pengelolaanya, seperti organisasi dari Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici, Koperasi Noto Wono dan Kelompok Masyarakat. Masing-masing organisasi tentu memiliki norma dan ideology yang berbeda. Akan tetapi dengan adanya perbedaan bukan berarti organisasi-organisasi tersebut menghambat justru dapat bersatu karena tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat melalui sector pariwisata.” (Wawancara dengan Bapak Sugandi dilaksanakan pada tanggal 14 November 2018)

Pengelolaan Obyek Wisata Puncak Becici tentu tidak terlepas dari organisasi-organisasi masyarakat seperti Koperasi Noto Wono, Pengelola, Karang Taruna, Kelompok Sadar Wisata dan lain-lain. Walaupun setiap organisasi tersebut memiliki norma atau ideology yang berbeda, tapi mereka memiliki satu tujuan yang sama yaitu meningkatkan sector pariwisata dengan tetap menjaga kelestarian hutan di kawasan Obyek Wisata Puncak Becici.

## **2. Masyarakat Memiliki Tokoh yang Dituakan**

Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici memiliki tokoh yang dituakan yaitu Bapak Sugandi Saputro. Beliau adalah ketua dari Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici. Beliau dipilih menjadi ketua karena mengerti akan tradisi local dan pengetahuan mengenai dunia pariwisata khususnya pariwisata yang memanfaatkan hutan, selain itu juga memiliki kebijakan untuk menentukan keputusan terkait pengembangan-pengembangan yang akan dilakukan di Obyek Wisata Puncak Becici.

## **3. Masyarakat Berpartisipasi dalam Pembangunan yang Dilakukan Oleh Mereka Sendiri**

Dukungan dari Pemerintah yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal mengembangkan kegiatan pariwisata maka, masyarakat mulai membuat sebuah tim pengelola yang dapat dijadikan sebagai pelaku wisata. Dengan

dibentuknya tim pengelola dan kelompok masyarakat ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat menggerakkan pariwisata tanpa melibatkan masyarakat, begitu pula masyarakat tidak dapat melakukan kegiatan pariwisata apabila tidak mendapatkan izin dari pemerintah. Terdapat dua tim pengelola di dalam Obyek Wisata Puncak Becici, yaitu:

a. Koperasi Noto Wono

Kawasan hutan yang terdapat di Dlingo merupakan kawasan milik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga Koperasi Noto Wono dibentuk untuk mewadahi aktivitas Kelompok Tani Hutan atau aktivitas masyarakat yang dilakukan di hutan berkaitan dengan pariwisata. Partisipasi Koperasi Noto Wono adalah sebagai payung hukum yang memiliki alat pungut yang disebut dengan operator. Koperasi ini memiliki tujuh operator dan dua sub unit operator sehingga terdapat Sembilan kelompok masyarakat diantaranya Pinus Pengger, Puncak Becici, Pinus Sari, Seribu Batu Rumah Hobbit, Bukit Panguk, Bukit Mojo, Lintang Sewu (terdapat dua sub unit yaitu Pinus Asri dan Lembah). Seluruh operator tersebut dibawah kendali Koperasi Noto Wono sehingga operator bertanggung jawab kepada Koperasi dan Koperasi bertanggungjawab kepada Pemerintah.

Berikut merupakan wawancara peneliti dengan Bapak Totok selaku Bendahara di Koperasi Noto Wono :

“Tanggungjawab Koperasi Noto Wono adalah membina operator mengenai kepariwisataan karena aktivitas-aktivitas yang dilakukan

akan dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah. Selain itu juga sebagai payung hukum yang artinya kegiatan yang dilakukan oleh operator sudah resmi atau legal. Kegiatan yang dilakukan yaitu mendampingi operator misalnya dibidang administrasi, dan pengembangan. Operator harus berkoordinasi dengan Koperasi terkait pengembangan yang akan dilakukan di Obyek Wisata tersebut. Koperasi Noto Wono juga mendampingi, mensubsidi Obyek Wisata yang kurang berkembang yaitu Bukit Mojo dan Pintu Langit karena dari segi finansial belum mencukupi sehingga harus ada perhatian yang lebih.” (Wawancara dengan Bapak Totok dilaksanakan pada tanggal 28 November 2018)

Setiap satu bulan sekali pada tanggal 10 mengadakan pertemuan rutin yang di hadiri oleh Operator dan Instansi Pemerintahan (RPH) yang membahas mengenai himbuan atau penyampaian program kerja, hingga evaluasi. Koperasi Noto Wono memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh operator. Karena operator merupakan tanggungjawab dari Koperasi.

#### b. Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici

Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici merupakan operator di kawasan tersebut. Berikut merupakan wawancara peneliti dengan narasumber Bapak Tri selaku Bendahara Pengelola :

“Kelompok ini dibentuk pada awal tahun 2016 yang di ketuai oleh Bapak Sugandi dan memiliki 50 orang anggota. Setiap anggota dibagi menjadi beberapa kelompok membentuk sebuah tim misalnya tim kreatif, seksi kebersihan, studio alam seksi kesekretariatan dan lain-lain. Hal itu dilakukan agar masing-masing anggota dapat focus dan bertanggungjawab kepada bidangnya masing-masing.” (Wawancara dengan Bapak Tri dilakukan pada tanggal 7 Desember 2018)

Anggota yang tergabung dalam pengelola merupakan warga asli Gunung Cilik karena memang letak dari Obyek Wisata Puncak Becici

adalah di desa tersebut sehingga masyarakat asli diberdayakan agar merasakan manfaat dari adanya kegiatan pariwisata. Yang tergabung dalam Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici tidak hanya pemuda atau pemudi saja melainkan orang tua atau Bapak-bapak yang dahulu tergabung dalam Kelompok Tani Hutan. Mereka kini beralih dari menyadap getah hutan pinus menjadi pengelola inti. Peran dari Pengelola Inti sangat berdampak pada keberlanjutan Obyek Wisata Puncak Becici karena mereka yang terjun langsung untuk mengelola wisata ini mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Berikut merupakan Pendapatan Obyek Wisata Puncak Becici pada tahun 2017:

Gambar 3.2 Pendapatan Puncak Becici Tahun 2017

1	NO	BULAN	TIKET MASUK	MOTOR	MOBIL	BUS	HAMMOCK	SEWA AULA	SEWA TEMPAT	FOTO SESION	SEWA WARUNG	CAMP
2	1	FEBRUARI DARI TGL 3	20943	6910	1813	50						
3	2	MARET	21032	6635	2074	35						
4	3	APRIL	27695	8334	2920	60						
5	4	MEI	24728	7812	2702	67						
6	5	JUNI	29177	7141	3780	18						
7	6	JULI	72971	14303	9815	168	531					
8	7	AGUSTUS	41995	8210	5400	241	931	2	3	3	13	
9	8	SEPTEMBER	44839	8172	5611	225	616	8	6	5	13	
10	9	OKTOBER	45128	7639	4913	370	505	4	5	2	13	
11	10	NOVEMBER	33880	4048	3624	439	282	7	10	2	13	
12	11	DESEMBER	74781	8412	10237	401	727	9	4	6	13	215
13		JUMLAH	437169	87616	52889	2074	3592	30	28	18	65	215
14		NOMINAL	Rp 874,338,000	Rp175,232,000	Rp264,445,000	Rp 41,480,000	Rp 35,920,000	Rp 7,500,000	Rp 5,600,000	Rp 3,600,000	Rp 6,500,000	Rp 3,225,000
15												
16		JUMLAH BRUTO	75%	25%								
17		Rp	1,417,840,000	Rp 1,063,380,000	Rp 354,460,000							

Sumber: Pengelola Puncak Becici

Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa pemasukan Obyek Wisata Puncak Becici yaitu dari hasil tiket masuk berupa motor mobil dan bus kemudian dari hasil penyewaan fasilitas yang terdapat di Puncak Becici seperti aula, panggung sewa warung dan lain-lain. Pada tahun 2018

Obyek Wisata Puncak Becici mendapatkan pemasukan sebesar 1.374.286.200 namun data sumber pemasukan tersebut belum dapat dicantumkan karena belum direkap oleh pengelola.

Seperti yang telah disampaikan diatas, peran dari kedua kelompok masyarakat tersebut berdampak pada pengembangan dan keberlanjutan di Obyek Wisata Puncak Becici. Kedua kelompok tersebut saling terikat satu sama lain akan tetapi memiliki tugas yang berbeda dimana Koperasi Noto Wono adalah wadah dari para operator pengelola Obyek Wisata Puncak Becici. Sehingga setiap aktivitas yang dilakukan di Obyek Wisata Puncak Becici harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Koperasi Noto Wono karena koperasi ini merupakan pemegang kendali dari para pengelola.

Pengelola ini dibawah kendali dari Koperasi Noto Wono sehingga kegiatan atau aktivitas yang dilakukan nantinya akan dilaporkan kepada Koperasi Noto Wono sehingga Koperasi Noto Wono dan Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici memiliki keterkaitan, akan tetapi pelaku wisata yang menjalankan kegiatan di Puncak Becici adalah Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici. Pada tanggal 10 setiap bulannya Pengelola, Koperasi Noto Wono, RPH Mangunan mengadakan rapat rutin yang membahas mengenai monitoring dan evaluasi kerja sehingga terdapat adanya keterbukaan dan tanggungjawab yang baik.

Obyek Wisata Puncak Becici memiliki kelompok masyarakat yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan pengembangan pariwisata suatu daerah. Ketersediaan sarana dan prasarana

atau fasilitas umum akan semakin membaik apabila ada keterlibatan dari kelompok masyarakat sebagai penyedia jasa wisata. Di Obyek Wisata Puncak Becici terdapat beberapa kelompok masyarakat yang menyediakan fasilitas sebagai penunjang kegiatan pariwisata, yaitu:

1) Jeep Wisata (*Dlingo Adventure Community*)

Adanya Obyek Wisata Puncak Becici memberi peluang kepada masyarakat untuk mendirikan usaha agar menunjang pengembangan dari Obyek Wisata tersebut salah satunya adalah Jeep Wisata. Masyarakat yang ingin memulai usaha ini akan tergabung dalam Komunitas Jeep Wisata yang bernama *Dlingo Adventure Community*. komunitas ini memiliki konsep pemberdayaan yang artinya anggota yang tergabung dalam komunitas ini hanya warga asli Desa Muntuk. Jumlah armada yang dimiliki yaitu 21 buah dan masing-masing Jeep memiliki dua *driver* untuk mengoperasikan.

Berikut merupakan wawancara peneliti dengan Bapak Jarot selaku Pengurus Jeep Wisata :

“Dengan adanya usaha-usaha yang didirikan oleh masyarakat tersebut mampu menggerakkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat sekitar. Jeep Wisata memiliki paket pilihan rute yang ingin dilalui oleh pengunjung. *Dlingo Adventure Community* bekerjasama dengan beberapa Obyek Wisata yang terdapat di Dlingo sehingga memiliki tempat yang wajib dikunjungi sekaligus mempromosikan Obyek-obyek wisata tersebut kepada pengunjung.”

*Dlingo Adventure Community* juga memiliki kegiatan sosial kemasyarakatan diantaranya membersihkan rute jalan, penambalan

jalan berlubang, dan santunan anak yatim yang terdapat di Dusun Muntuk. Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas tersebut memberi manfaat kepada masyarakat sekitar.

## 2) Homestay

Fasilitas yang terdapat di Obyek Wisata Puncak Becici salah satunya adalah homestay. Awal mula terbentuknya yaitu masyarakat sekitar memikirkan inovasi baru agar dapat berkembang dengan memanfaatkan adanya Obyek Wisata Puncak Becici, yang pada akhirnya memutuskan untuk membuat home stay. Bapak Saryanto mengajak warga untuk turut berpartisipasi. Terdapat 10 homestay yang berada di Dusun Gunung Cilik yaitu Madit Jaya Homestay, Vikam Homestay, Rido Homestay, Via Homestay, Kurnia Homestay, Bg Homestay, Wana Jaya Homestay, Putra Mandiri Homestay, Ngatio Homestay dan Dewi Guci 1 Homestay.

Berikut merupakan wawancara peneliti dengan Bapak Saryanto selaku salah satu pemilik homestay :

“Saya mengajak warga yang rumahnya memiliki tiga kamar atau empat kamar dijadikan home stay. Rumah dan kamar mulai dibersihkan dan dirapikan, kamar mandi dibersihkan supaya layak untuk menjadi homestay. Dulu awalnya saya dengan Pak Jarot yang berminat membuat home stay, terus kedatangan tamu banyak dari Jakarta saya dan Pak Jarot membersihkan rumah, dari situ teman-teman yang lain mulai tertarik untuk membuat home stay dan mendaftar ke saya.”  
(Wawancara dengan Bapak Saryanto dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2018)

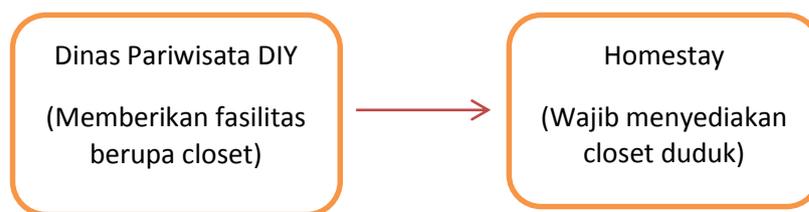
Di Dusun Gunung Cilik terdapat sepuluh homestay rata-rata memiliki tiga kamar, warga sekitar membentuk kepengurusan yang diketuai oleh Bapak Saryanto. Setelah membentuk kepengurusan mereka juga membuat peraturan yang harus ditaati oleh pengunjung salah satunya yaitu tidak boleh menerima tamu yang berpasangan akan tetapi tidak dengan status menikah. Apabila ada yang melanggar, akan ditegur karena sudah disepakati bersama, hal tersebut dilakukan untuk menjaga nama baik Desa. Tarif yang ada pada setiap home stay disamakan mulai dari harga Rp 150.000,- hingga Rp 200.000,-. Tarif Rp 200.000,- biasanya disediakan welcome drink, snack ringan dan sarapan pagi dan tariff Rp 150.000,- hanya welcome drink saja. Homestay tersebut berkaitan dengan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian Dinas tersebut memsubsidi masing-masing homestay mendapatkan Rp 15.000.000,- berupa barang yaitu wc duduk diberikan melalui Desa.

Berikut merupakan wawancara peneliti dengan narasumber Ibu Anjar selaku Bidang Promosi :

“Salah satu upaya untuk mewujudkan fasilitas di Obyek Wisata berstandar Asean, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta memfasilitasi toilet kepada *home stay* yang terdapat di kawasan Puncak Becici harus berstandar Asean karena yang dibidik adalah wisatawan mancanegara salah satu standard Asean yang harus dimiliki oleh *home stay* adalah *closet* duduk dan mendapatkan bantuan sejumlah 25 *closet* duduk masing-masing *home stay*.” (Wawancara dengan Ibu Anjar dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2019)

Seperti yang telah diuraikan diatas, peran dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai yaitu sebagai fasilitator Selain itu karena Obyek Wisata Puncak Becici secara administrative terletak di Kabupaten Bantul, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga membantu mempromosikan wisata tersebut. Berikut merupakan gambaran peran Dinas Pariwisata DIY dalam memfasilitasi homestay

Gambar 3.3 Peran Dinas Pariwisata DIY



### 3) Warung Makan

Warung makan ini dibuat setelah adanya Obyek Wisata Puncak Becici dan terletak di dalam area Obyek Wisata. Di dalam areanya sendiri terdapat beberapa warung dan setiap warung ada yang memiliki dua pegawai atau tiga pegawai. Pemilik dan pegawai tersebut merupakan penduduk asli Dusun Gunung Cilik. Setiap harinya pendapatan selalu berbeda dan selalu melonjak di hari liburan. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sulis selaku pegawai di warung tersebut:

“Pendapatan setiap harinya berbeda-beda, di hari-hari biasa terkadang sepi pembeli akan tetapi pada saat musim liburan Alhamdulillah selalu ramai. Untuk pendapatan kotor di hari-hari biasa berkisar Rp 500.000,- sampai Rp 700.000,- sedangkan

pada musim liburan bisa mencapai Rp 2.000.000,- setiap bulan.” (Wawancara dengan Ibu Sulis dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2018)

Warung-warung yang terdapat di Obyek Wisata Puncak Becici merupakan tempat yang sudah disediakan oleh pengelola. Sehingga siapapun warga Dusun Gunung Cilik atau Desa Muntuk diperbolehkan untuk menempatnya dengan biaya sewa warung setiap bulannya sekitar Rp 260.000,- akan tetapi belum dengan biaya listrik perbulan Rp 50.000,-.

#### 4) Cinderamata

Di Obyek Wisata Puncak Becici tidak hanya terdapat warung makan saja, akan tetapi juga terdapat warung pernak-pernik dengan berbagai macam pilihan seperti gantungan kunci, wayang kulit, gelang, dan lain-lain. Keberadaan warung pernak-pernik merupakan opsi bagi wisatawan untuk membeli oleh-oleh atau buah tangan khas dari Puncak Becici. Ada yang menarik dari pernak-pernik yang terdapat disini bahwasanya tidak semua barang yang tersedia diambil dari luar akan tetapi juga ada sebagian yang dibuat oleh pemilik usaha sendiri.

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Parmi selaku pemilik warung tersebut:

“Tidak semua barang yang terdapat disini diambil dari luar, ada juga yang kita buat sendiri seperti hiasan dalam botol jadi kita memanfaatkan botol-botol bekas supaya tidak terbuang sia-sia dan menjadikannya bernilai sedangkan barang berupa wayang kulit diambil dari kerajinan yang ada di Desa Muntuk.”

(Wawancara dengan Ibu Parmi dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2018)

Sama seperti warung yang lainnya menurut Ibu Parmi pendapatan akan lebih banyak di hari-hari libur.

“Pendapatan lebih banyak dihari-hari libur karena dapat mencapai 2 juta rupiah selain itu cuaca juga mempengaruhi karena pada saat musim hujan, pengunjung jarang yang datang” tambahnya. setelah adanya Obyek Wisata Puncak Becici ini saya merasa senang karena menambah lapangan pekerjaan, dan bangga bisa menjual hasil karya sendiri.” (Wawancara dengan Ibu Parmi dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2018)

Berikut merupakan wawancara peneliti dengan narasumber Ibu Yani selaku penduduk Dusun Gunung Cilik :

“Setelah adanya Obyek Wisata Puncak Becici kini masyarakat disini lebih terbuka dan turut membantu menjaga kelestarian Hutan, selain itu masyarakat antusias untuk membuka usaha agar mampu memenuhi kebutuhan wisatawan yang berdatangan setiap harinya.” (Wawancara dengan Ibu Yani dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2018)

Partisipasi masyarakat Dusun Gunung Cilik dalam tata kelola pariwisata berbasis masyarakat sangat baik dimana masyarakat ikut serta menjaga, merawat, dan bergotong royong untuk membangun pariwisata di Puncak Becici. Warga masyarakat merasakan dampak langsung dari adanya pariwisata tersebut. Dahulu mereka yang tidak memiliki pekerjaan kini mendapatkan pekerjaan. Selain itu masyarakat juga memanfaatkan keberadaan pariwisata tersebut dengan membuka usaha dikawasan Puncak Becici seperti warung makan, home *stay*, jeep wisata, penjual pernak pernik, dan penjual

bunga. Di kawasan Puncak Becici terdapat 15 warung makanan dimana setiap warung memiliki dua pegawai untuk berjualan.

Dari paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok masyarakat memang memiliki peran yang sangat penting kaitannya dengan menyediakan fasilitas-fasilitas seperti yang telah dijelaskan diatas. Hal ini karena pemerintah tidak mungkin akan mampu menyediakan fasilitas yang lengkap atau bekerja sendiri. Oleh karena itu kelompok masyarakat sekitar Objek Wisata Pucak Becici sangat membantu dan mengurangi beban dari pemerintah. Akan tetapi meskipun begitu peran pemerintah juga tetap ada dalam membantu atau memfasilitasi masyarakat hal ini seperti dengan memberikan bantuan kepada pemilik homestay sebesar 15 juta rupiah untuk membuat kamar mandi yang lebih baik dan nyaman. Oleh sebab itu peran masyarakat dan pemerintah sangatlah penitng dan dibutuhkan untuk lebih memajukan pariwisata yang ada khususnya pusat pariwisata puncak becici.

Masyarakat yang berada di Dusun Muntuk khususnya di kawasan Obyek Wisata Puncak Becici turut berpartisipasi walaupun belum semuanya. Masyarakat ikut berpartisipasi dengan cara menerapkan rumus pariwisata yaitu “Sapta Pesona” yang *Pertama* yaitu Aman, masyarakat ikut terlibat dalam konteks menjaga keamanan dari setiap pengunjung, *Kedua* yaitu Tertib, masyarakat juga tertib dari cara berlalu lintas, *Ketiga* yaitu Bersih, masyarakat sering melakukan

kegiatan kebersihan disepanjang jalur akses wisata yang dilakukan setiap minggu yang disebut kegiatan Senin Bersih, *Keempat* yaitu Sejuk, masyarakat berpartisipasi untuk menjaga kesejukan dengan cara tidak menebangi pohon yang berada di pinggir jalan, apabila ada yang gersang ditanami pepohonan, *Kelima* yaitu Indah, masyarakat menjaga keindahan di Desa tersebut dengan menanam tanaman bunga di pinggir jalan agar terlihat indah, *Keenam* yaitu Ramah, masyarakat yang memiliki usaha seperti warung, penjual anyaman, penjual bunga, mereka melayani wisatawan dengan ramah dan yang ke *Tujuh* yaitu Kenangan, perilaku masyarakat atau cara masyarakat melayani wisatawan akan menjadi kenangan untuk wisatawan tersebut, apabila respon masyarakat ramah tentu akan menjadi kenangan yang indah untuk wisatawan yang berkunjung di Obyek Wisata Puncak Becici.

Keterlibatan masyarakat sangatlah penting untuk keberlangsungan atau kelestarian dari sumber daya alam yang ada. Karena masyarakat ini lah yang secara langsung terlibat dalam aktivitas obyek wisata puncak becici. oleh karena itu tanpa adanya kesadaran dari masyarakat sangat mustahil sumber daya alam yang ada akan bisa bertahan. Ini lah juga yang menjadi alasan penting mengapa dalam pengelolaan pariwisata harus melibatkan atau berbasis masyarakat.

## **C. Manajemen**

### **1. Masyarakat Memiliki Aturan dan Peraturan untuk Lingkungan, Budaya dan Manajemen Pariwisata**

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat, begitu juga masyarakat yang memiliki aturan untuk lingkungan sekitar. Masyarakat tidak diperbolehkan untuk merusak tanaman, menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Masyarakat dihimbau untuk menjaga alam dengan cara merawat hutan seperti memberi pupuk pada tanaman, menanam pepohonan, melakukan gotong royong untuk membersihkan tanaman-tanaman liar, dan tetap menjaga keindahan alam.

Berikut merupakan wawancara peneliti dengan narasumber Bapak Sugandi selaku Ketua Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici :

“Dahulu pada saat Obyek Wisata Puncak Becici belum diresmikan dan fasilitas belum memadai, ada beberapa remaja menyalahgunakan tempat tersebut, kemudian ada pengunjung yang kehilangan helm pada saat mengunjungi Puncak Becici. Hal itu tentu memberi dampak yang buruk kepada masyarakat terhadap keberadaan Puncak Becici, oleh sebab itu setelah dibentuknya Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici mereka memiliki aturan-aturan untuk menjaga keamanan agar memberi kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung.” (Wawancara dengan Bapak Sugandi dilaksanakan pada tanggal 14 November 2018)

Jam berkunjung wisatawan pun dibatasi, Puncak Becici buka pada pukul 07.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Akan tetapi karena tempat ini dapat dijadikan tempat untuk camping, maka pada saat wisatawan yang

ingin melakukan kegiatan tersebut harus konfirmasi terlebih dahulu kepada pengelola, kemudian pengelola akan berjaga malam di Sekretariat sebagai bentuk tanggungjawab dan rasa aman kepada pengunjung. Manajemen pengelolaan pariwisata yang diterapkan sesuai dengan *standard operating procedure*. Apabila ada karyawan / bagian dari pengelola melakukan kesalahan dalam pekerjaan tentu akan diberi sanksi yang berlaku sesuai dengan tingkat kesalahan yang dibuat. Hal tersebut dilakukan agar Pengelola dapat disiplin dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung.

## **2. Organisasi Local atau Mekanisme yang ada untuk Mengelola Pariwisata dengan Kemampuan untuk Menghubungkan Pariwisata dan Pengembangan Masyarakat**

Organisasi memiliki peranan penting kaitannya dengan bagaimana mengelola obyek wisata puncak becici. Organisasi ini yang nantinya akan membantu masyarakat yang ada disana untuk lebih meningkatkan kualitas dan juga pengembangan masyarakat sekitar. Organisasi yang ada dalam pengelolaan pariwisata puncak becici diantaranya yaitu pengelola Obyek Wisata Puncak Becici dan Koperasi Noto Wono. Lebih lanjut lagi koperasi Notowono ini secara umum menjadi badan hukum yang menjamin keberlangsungan dari setiap obyek wisata yang ada. Didalam koperasi Notowono terdiri dari para pengelola obyek wisata di 9 titik yang di

dalamnya ada obyek wisata punya becici. Pengelola obyek wisata puncak becici ini selanjutnya akan bertanggung kepada koperasi Notowono.

Berikut merupakan wawancara Peneliti dengan narasumber Bapak Purwo Harsono selaku Ketua Koperasi Noto Wono :

“Sebenarnya Koperasi Noto Wono ini hadir dari keresahan masyarakat yang takut apabila nantinya disebut sebagai pariwisata yang ilegal karena belum mempunyai badan hukum. Selain itu juga Koperasi Noto Wono ini juga bertugas dalam membrikan pelatihan mengenai bagaimana cara mengelola pariwisata yang baik. Dari pelatihan tersebut tentu akan meningkatkan kemampuan misalnya dalam melayani wisatawan, menrapkan sapta pesona dan yang terpenting yaitu dapat mengubah pemikiran masyarakat sekitar yang tadinya menyadap getah karet menjadi pelaku pariwisata dan lain sebagainya.” (Wawancara dengan Bapak Purwo Harsono dilaksanakan pada tanggal 28 November 2018)

Seperti yang telah dijelaskan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa oragansiasi local dlam hal ini Koperasi Noto Wono dan Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici telah berupaya untuk mengembangkan kemampuan masuyarakat. Dan masyarakat mulai menyesuaikan kemampuan tersebut dengan baik.

### **3. Keuntungan Didistribusikan Secara Adil Bagi Masyarakat**

Pada setiap tahun Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemeriksaan terhadap Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY dan juga Koperasi Noto Wono dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan dana pendapatan dari setiap Obyek Wisata dibawah naungan Koperasi Noto Wono. Mekanisme keuangan atau pembagian hasil pendapatan juga telah dipahami oleh Inspektorat Daerah Istimewa

Yogyakarta sehingga memang sudah ada keterbukaan atau transparansi dari masing-masing pihak. Tiket masuk yang terdapat di Obyek Wisata Puncak Becici diberikan dari Dinas Keuangan. Setiap tiket masuk dikumpulkan menjadi satu kemudian dihitung bersama. Pembagian hasil pendapatan sebesar 70% untuk pengelola, 5% untuk koperasi dan 25% langsung diberikan kepada Kas Daerah atau Pemerintah Daerah yang diawasi oleh Inspektorat dan dipastikan secara langsung.

Berikut merupakan data pembagian PAD pada tahun 2017 dari hasil pendapatan Obyek Wisata Puncak Becici:

Tabel 3.1 Jumlah Pembagian PAD Tahun 2017

Operator	Jumlah
Puncak Becici	Rp 1,417,840,000.000
Koperasi 75 %	Rp 1,063,380,000.000
PAD 25%	Rp 354,460,000.000

Sumber: Koperasi Noto Wono

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pendapatan bersih yang diterima oleh pengelola pada tahun 2017 yaitu Rp 1.063.380.000 dan PAD yang diterima yaitu Rp 354.460.000. Pada pertengahan tahun 2017 pendapatan yang diterima oleh pengelola dibagi kepada Koperasi Noto Wono sebesar 5%.

Berikut merupakan data pembagian PAD pada tahun 2018 dari hasil pendapatan Obyek Wisata Puncak Becici:

Tabel 3.2 Jumlah Pembagian PAD Tahun 2018

Operator	Total Pendapatan	70%	25%	5%
Puncak Becici	Rp 1.963.266.000	Rp 1.374.286.200	Rp 490.816.500	Rp 98.163.300

Sumber: Koperasi Noto Wono

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pendapatan bersih yang diterima oleh Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici pada tahun 2018 yaitu Rp 1.374.286.200, PAD yang diterima Pemerintah yaitu Rp 490.816.500 dan Koperasi Noto Wono mendapatkan pemasukan sebesar Rp 98.163.300. Hasil pendapatan Obyek Wisata Puncak Becici mengalami peningkatan dimana pada tahun sebelumnya mendapatkan hasil Rp 1.063.380.000.

Dalam mengelola pariwisata tentu pihak-pihak yang tergabung sebagai pengelola akan diberi gaji atau upah. Mereka mendapatkan gaji atau upah sesuai dengan Upah Minimum Regional yang berlaku di daerah tersebut. Akan tetapi kegiatan pariwisata tidak setiap hari ramai atau pengunjung yang berdatangan setiap harinya tidak dengan jumlah yang sama.

“Pernah terjadi di Obyek Wisata Puncak Becici, ketika pengunjung yang datang tidak ramai yang biasanya diakibatkan karena musim penghujan, tentu pendapatan yang masuk sangat kurang atau minus. Sehingga untuk memberi gaji kepada pengelola harus meminjam kepada Koperasi Noto Wono terlebih dahulu.

Pembagian gaji diberikan setiap bulan dan disesuaikan dengan kehadiran pegawai setiap harinya, apabila pada hari tertentu pegawai tidak berangkat, maka gaji akan dipotong sesuai dengan absensi yang ada.” (Wawancara dengan Bapak Sugandi dilaksanakan pada tanggal 14 November 2018)

Seperti yang telah disampaikan diatas, keuntungan dari Pengelolaan Obyek Wisata Puncak Becici telah dibagikan secara adil kepada anggota setiap bulannya. Dan apabila anggota tidak hadir maka gaji tersebut akan dipotong sesuai dengan absensinya. Hal itu sudah sesuai dengan aturan karena dengan begitu anggota dapat bertanggungjawab dalam pekerjaannya.

#### **4. Keuntungan dari Pariwisata Memberikan Kontribusi terhadap Dana Masyarakat untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial Masyarakat**

Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici juga peduli terhadap kegiatan sosial, keuntungan dari hasil kegiatan pariwisata tidak hanya dibagikan kepada pegawai saja akan tetapi juga kepada masyarakat sekitar. Hasil yang didapat dibagi menjadi tiga yaitu 40% untuk kesejahteraan karyawan, 25% untuk kegiatan pembangunan, dan 35% untuk sosial.

Berikut merupakan wawancara Peneliti dengan narasumber Bapak Sugandi selaku Ketua Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici :

“Yang dimaksud untuk kesejahteraan karyawan adalah gaji yang diberikan, sedangkan pembangunan adalah seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki fasilitas yang terdapat di Obyek Wisata Puncak Becici, dan kegiatan sosial yaitu memberikan sumbangan untuk kegiatan pendidikan, kegiatan keagamaan, santunan untuk anak yatim piatu, jompo dan lansia, kemudian juga mendukung kegiatan yang berhubungan dengan

lingkungan.” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 14 November 2018)

Seperti yang telah disampaikan diatas, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici sangat positif dimana mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri melainkan keuntungan dari kegiatan pariwisata tersebut dibagikan kepada orang-orang sekitar sehingga manfaatnya dirasakan oleh banyak orang.

#### **D. Pembelajaran atau *Learning***

##### **1. Membina Proses Belajar Bersama antara Tuan Rumah dan Tamu**

Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta berperan sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan hanya sebagai pembina teknis. Dimana pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta terjun langsung mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, segmen pasar mana yang akan dituju, dan juga dengan memberi pemahaman mengenai *ecotourism* atau yang dikenal sebagai wisata berbasis lingkungan. Karena yang dijual adalah potensi hutan maka harus dipikirkan untuk kedepannya supaya dapat berkelanjutan akan tetapi tidak merusak fungsi hutan. Potensi warga harus dioptimalkan yang utama adalah masyarakat yang mengembangkan karena sebagai pelaku dan penikmat hasil pariwisata.

Selain memberikan fasilitas Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta juga memberikan pelatihan kepada masyarakat. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Yemi selaku Bidang Kapasitas SDM :

“Selain fasilitas yang mendukung harus diimbangi dengan SDM yang baik oleh karena itu kami memberikan pelatihan. Pelatihan tersebut bersifat yang dapat dihadiri oleh masyarakat sekitar. Pelatihan yang diberikan yaitu mengenai sadar wisata, sapta pesona, pelayanan prima, dan memberikan materi tentang kepariwisataan ada juga pelatihan khusus untuk pemandu yaitu bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik terhadap wisatawan.” (Wawancara dengan Ibu Yemi dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2019)

Selain Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga membantu mempromosikan pariwisata. Berikut merupakan wawancara peneliti dengan narasumber Bapak Joko selaku Kepala Seksi Kelembagaan Pariwisata :

“Dalam bidang promosi, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mempromosikan pariwisata melalui media sosial berupa website, facebook, mengikuti pameran potensi wisata, java promo (masing-masing daerah menyampaikan potensi daerah masing-masing) sekaligus bertukar informasi dan juga memiliki anjungan sehingga wisatawan dapat mengakses wisata apa saja yang terdapat di Kabupaten Bantul.” (Wawancara dengan Bapak Joko dilaksanakan pada tanggal 19 November 2018)

Pariwisata tidak akan berhasil apabila hanya dikelola oleh Dinas Pariwisata saja, dari segi tenaga, sumber daya manusia dan dana sangat terbatas. Adanya sinergitas dengan stakeholder yang lain yaitu dengan warga masyarakat, swasta, dan media untuk memajukan pariwisata.

Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici dalam menjalankan tugasnya dibekali dengan pembelajaran manajemen pengelolaan

pariwisata, pendampingan dan pelatihan. Pendampingan dan pelatihan dilakukan untuk memberi ilmu kepada pengelola mengenai bagaimana tugas yang telah diberikan kepada masing-masing individu agar mereka memahami apa saja yang harus dilakukan sesuai dengan bidang yang diterima, selain itu juga agar dapat berbagi ilmu kepada wisatawan yang datang mengenai bagaimana tata kelola yang terdapat di Obyek Wisata Puncak Becici.

## **2. Mendidik dan Membangun Pemahaman Tentang Budaya dan Cara Hidup yang Beragam**

Pemberlajaran yang dilakukan yaitu untuk meningkatkan kapasitas seperti pembelajaran bahasa. Karena pengunjung yang berdatangan tidak hanya dari domestic akan tetapi juga dari mancanegara. Sehingga bekal mengenai budaya yang dimiliki dan cara memperlakukan wisatawan asing juga harus dipelajari oleh Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici. Tapi biasanya setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda sehingga hasil yang didapat dari kegiatan pembelajaran tersebut tidak sama setiap individu.

### **3. Meningkatkan Kesadaran Konservasi Alam dan Budaya di Kalangan Wisatawan dan Masyarakat Setempat**

Alam dan budaya merupakan dua hal yang harus tetap dijaga kelestariannya dengan kata lain harus ada konservasi. Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Di Obyek Wisata Puncak Becici sudah menerapkan hal tersebut karena seluruh Obyek Wisata yang tergabung dalam Koperasi Noto Wono memiliki peraturan dan keharusan untuk menjaga alam dan budaya. Seperti yang tertuang dalam visi dari koperasi jasa wisata Noto Wono adalah merawat, menjaga, dan melestarikan hutan untuk dikembangkan jasa lingkungan wisata alam dalam rangka mencapai kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya.

Sehingga dalam hal menjaga sumber daya alam dan budaya adalah sebuah keharusan yang wajib dilaksanakan oleh pengelola yang tergabung dalam Koperasi Noto Wono termasuk Obyek Wisata Puncak Becici. Di Obyek Wisata Puncak Becici sudah menerapkan hal tersebut karena walaupun sudah banyak didirikan fasilitas seperti spot foto, camping ground, flying fox dan lain-lain akan tetapi pembangunan tersebut tetap memperhatikan sumber daya alam tanpa merusaknya.

Wisatawan yang mengunjungi Obyek Wisata Puncak Becici juga peduli dengan lingkungan. Kepedulian mereka ditunjukkan dengan turut berpartisipasi dalam hal penghijauan yaitu menanam pohon perindang dikawasan Obyek Wisata Puncak Becici. Bibit yang mereka tanam adalah

bibit yang dibawa oleh wisatawan sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wisatawan di Obyek Wisata Puncak Becici telah sadar akan lingkungan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari peran pemerintah baik Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kedua Dinas tersebut hanya sebagai regulator dan fasilitator. Seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas tersebut tentu tidak dapat menjalankan kegiatan pariwisata di Obyek Wisata Puncak Becici karena bukan bidangnya dan tidak sesuai dengan tupoksi. Dinas tersebut hanya menyediakan lahan dan memberikan arahan mengenai cara merawat hutan, cara mengelola hutan, dan cara memanfaatkan potensi hutan tanpa merusak hutan sehingga, memerlukan adanya keterlibatan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat membina masyarakat sekitar dan merubah pola pikir masyarakat yang dahulu bekerja sebagai penyadap getah berubah menjadi pelaku wisata.

Sedangkan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta memang tidak ada perjanjian kinerja dengan Koperasi Noto Wono namun Dinas Pariwisata DIY memang mendukung dan mendampingi setiap kegiatan pariwisata. Akan tetapi apabila hanya Pemerintah saja yang menjalankan kegiatan pariwisata tentu tidak dapat berjalan dengan baik karena keterbatasan jumlah SDM yang ada, sedangkan wisatawan pasti menginginkan pelayanan yang memuaskan. Oleh karena itu dibentuklah

suatu kelompok masyarakat yang menjadi pelaku wisata. Dari paparan tersebut dapat diidentifikasi keterlibatan dari masing-masing stakeholder dalam melakukan partisipasi sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kolaborasi dalam Partisipasi

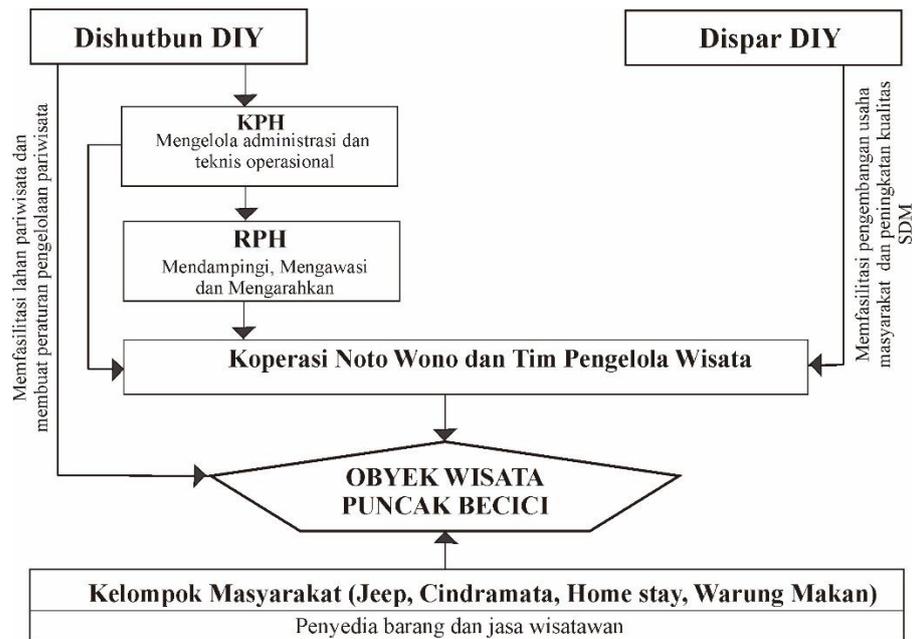
No	Stakeholder	Organiasi	Keterlibatan
1	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dishutbun DIY</li> <li>• Dispar DIY</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi lahan pariwisata dan membuat peraturan pengelolaan pariwisata</li> <li>• Memfasilitasi pengembangan usaha masyarakat dan peningkatan kualitas SDM</li> </ul>
2	Masyarakat	Tim Pengelola dan Penyedia Jasa Wisata	Mengikuti pelatihan SDM pariwisata dan menyediakan jasa penyewaan

Sumber: Hasil Temuan di Lapangan

Dari tabel diatas dapat menjelaskan mengenai kolaborasi dari setiap aktor-aktor yang terlibat. Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY dan Dinas Pariwisata DIY selalu mengadakan koordinasi. Walaupun Dinas Pariwisata DIY tidak melakukan perjanjian kinerja dengan Koperasi Noto Wono akan tetapi Dinas Pariwisata DIY mendukung dan memberi fasilitas kepada pengelola karena memang sasaran Dinas Pariwisata yaitu memberi pemahaman mengenai kegiatan pariwisata kepada masyarakat yang mengelola Obyek Wisata.

Keterlibatan dari berbagai aktor seperti yang telah disampaikan di atas dapat digambarkan dalam pola hubungan seperti gambar berikut:

Gambar 3.4 Pola Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat



Sumber: Hasil Temuan di Lapangan

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pariwisata di Obyek Wisata Puncak Becici menunjukkan bahwa adanya kolaborasi dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban kepada tim pengelola untuk memfasilitasi dan meningkatkan kualitas SDM yang mempunyai latar belakang pekerjaan sebagai penyadap getah agar dapat menjadi pelaku wisata. Sedangkan kelompok masyarakat menganggap adanya peluang untuk dijadikan usaha seperti jeep wisata, homestay, warung makan dan cindramata. Kelompok masyarakat ini memanfaatkan Obyek Wisata Puncak Becici sebagai ladang untuk membuka jasa wisata

yang dapat meningkatkan perekonomian. Pemerintah tidak dapat menjadi aktor utama dalam pengelolaan pariwisata sehingga terbentuklah Pariwisata Berbasis Masyarakat.

Tata Kelola Pariwisata di Obyek Wisata Puncak Becici belum melibatkan pihak pemerintah Desa dan Swasta. Padahal seharusnya Pemerintah Desa dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki salah satunya yaitu Obyek Wisata Puncak Becici, dengan dikembangkannya potensi-potensi tersebut dapat memberikan peluang dalam perekonomian sehingga akan meningkatkan PADes. Karena pengelolaan di Obyek Wisata Puncak Becici pada saat ini belum adanya keterlibatan dari pemerintah Desa.

Selain itu kebudayaan merupakan hal yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat karena mampu menopang kelangsungan hidup masyarakat. Disini peran dari pemerintah Desa juga sangat dibutuhkan untuk melestarikan kebudayaan karena kebudayaan merupakan identitas suatu daerah yang harus dilestarikan dan dikembangkan agar mampu menimbulkan rasa kebanggaan bagi masyarakat sekitar. Untuk sekarang ini di Dusun Gunung Cilik kebudayaan seperti kesenian belum dilibatkan dalam pengelolaan di Obyek Wisata Puncak Becici, menurut penulis sebaiknya kebudayaan yang dimiliki diikutsertakan dalam pengelolaan di Obyek Wisata Puncak Becici dengan cara menampilkan tari-tarian diwaktu tertentu misalnya dalam kurun waktu yang telah terjadwal. Dengan hal itu

wisatawan dapat mengerti dan menikmati kebudayaan yang ada di Dusun Gunung Cilik.

Selain itu salah satu penunjang dalam pengembangan pariwisata yaitu kemudahan akses transportasi agar memberikan kemudahan bagi wisatawan mengunjungi Obyek Wisata tersebut. Akan tetapi akses transportasi menuju ke Obyek Wisata masih kurang mendukung. Oleh sebab itu dalam pengelolaan Obyek Wisata Puncak Becici perlu adanya peran dari pihak swasta. Pihak swasta ini menyediakan fasilitas berupa transportasi seperti bus dan angkutan umum yang disediakan khusus untuk menuju Obyek Wisata Puncak Becici dan sekitarnya.